

diterbithan ; Biro Protohol dan Komunihasi Publih Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Susunan Dewan Redaksi Buletin Pemprov Kalteng "Isen Mulang"

Pelindung

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pengarah

Asisten Adminidtrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Penyaringan Informasi dan Publikasi pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Informasi Pemerintahan dan Umum pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Media dan Dokumentasi pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi

Kepala Sub Bagian Informasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Staf Pelaksana

Muliyani, S.Sos, Eka Supriyaningsih, Joko Prabowo, Nova Anggreni, Benito Zuares

Alamat Redaksi

JL RTA Milono No. 1 Palangka Raya Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus No. 2114/SK/Dirjen PPG/SITT/1995

Daftar Isi:

Darial tol ,
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Serahkan DIPA T.A 20193
BPK Perwakilan Kalteng Serahkan LHP dan PDTT 20184
Diguyur Gerimis, Pemprov Kalteng Tetap Khidmat Laksanakan Upacara Bela Negara5
Gub Kalteng Minta Para Bupati/Walikota Dukung Pembentukan BNN Kabupaten/Kota6
Pemprov Kalteng Dukung Upaya Percepatan Kebijakan Satu Peta7
Gub Kalteng : Bupati dan Walikota Jangan Abaikan Fungsi Pengawasan Internal8
DPRD dan Pemprov Kalteng Setujui 3 Raperda Diteta Menjadi Perda9
Ribuan ASN Lingkup Pemprov Kalteng Peringati HUT KORPRI 20189
Gubernur Kalteng Optimis Penerimaan PKB dan BBNKB Tercapai 100 %10
Direktur Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Arsan Latif Tegaskan PERGUB Kalteng No.16 tahun 2018 Sah11
TPID Kalteng Luncurkan Prog <mark>r</mark> am Inovasi "Suply Chain Daging Ayam Beku"12
Wagub Kalteng Beberkan Ke <mark>be</mark> rhasilan Pembangunan Kalteng Tig <mark>a Tahun Terakhir1</mark> 3
Pertemuan Tahunan BI Perw <mark>aki</mark> lan Kalteng 201814
Gub Kalteng : Sumber Daya Genetik Spesifik Lokal Harus Dilindungi Dari Kepunahan15

Gub Kalteng : Restorasi Gambut Tidak Boleh Menimbulkan Konflik___16

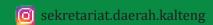
Gub Kalteng : Keluarga, Penentu Pembentukan Kematangan Anak___17

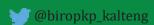
Gubernur Kalteng Kukuhkan Bunda PAUD Provinsi dan Kabupaten se-Kalteng 18

Gubernur Ka<mark>lteng Te</mark>gaskan Komitmennya Dukung Peningkatan Kualitas SDM Kalteng___19

Waket MPR RI Beberkan Peran Penting Perempuan Menjaga Keutuhan Bangsa____19

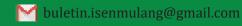








protokol komunikasi publik kalteng



Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Serahkan DIPA T.A 2019

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Gubernur Kalimantan Tengah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 kepada Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Perangkat Daerah dan Kepala Instansi Vertikal provinsi Kalteng di Istana Isen Mulang Palangka Raya, Senin pagi (17/12).

Total Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) lingkup provinsi Kalimantan Tengah termasuk Kabupaten/Kota berjumlah Rp.17.492 triliun lebih dengan perincian Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.10,428 triliun lebih, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.1,492 triliun lebih, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp. 2,039 triliun lebih, Dana Insentif Daerah (DID) Rp.1, 983 triliun lebih dan Dana Desa Rp.1,347 triliun lebih.

Kemudian Total Alokasi Dana APBN yang dikelola melalui DIPA Kantor Pusat (KP) dan DIPA Kantor Daerah (KD) sebesar Rp.5,719 triliun lebih terdiri dari DIPA Kantor Pusat (KP) Rp.1.687 triliun lebih dan DIPA Kantor Daerah (KD) sebesar Rp.4.032 triliun lebih. Selain itu Total Alokasi Dana APBN yang dikelola pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui DIPA Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.337,969 Miliar lebih terdiri dari DIPA Dekonsentrasi (DK) Rp.139,486 Miliar lebih dan DIPA Tugas Pembantuan (TP) provinsi, kabupaten dan kota sebesar Rp.198,482 Miliar lebih.

Gubernur mengharapkan kepada para Bupati dan Walikota agar paling lambat tanggal 27 Desember 2018 seluruh Dokumen DIPA Kabupaten dan Kota se-Kalteng itu sudah diserahkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setempat. Gubernur juga menegaskan agar dalam pengelolaan anggaran bebas dari praktik KKN. "Saya ingatkan kembali kepada seluruh aparat pemerintah pusat di daerah dan aparat pemerintah daerah provinsi Kalteng agar pelaksanaan anggaran 2019 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, serta APBD Kabupaten



dan Kota bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme", tegas Sugianto Sabran.

Demikian juga diharapkan kepada pihak kabupaten/kota dan provinsi Kalimantan Tengah dalam menangani penyerahan aset harus sampai selesai, tuntas dan akurat karena akan berpengaruh terhadap penilaian laporan keuangan pemerintah daerah. "Bupati dan Walikota juga wajib berkoordinasi membantu pemerintah provinsi Kalteng dalam menginventarisasi aset agar tidak terjadi lagi aset yang tidak diketahui keberadaannya", jelas gubernur.

Seusai penyerahan DIPA 2019, dilanjutkan dengan penyerahan 5 Unit Bus kepada pemerintah Kota Palangka Raya dan 8 unit kepada 8 pemerintah kabupaten masing-masing Kotawaringin Barat, Katingamn, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, Sukamara, Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Timur.***





Edisi 291/Januari 2019

Builetin Isen Mulang

BPK Perwakilan Kalteng Serahkan LHP dan PDTT 2018



PALANGKA RAYA – BIRO PKP. BPK Perwakilan Kalteng dalam Semester II tahun 2018 telah melaksanakan 2 jenis pemeriksaanmeliputi Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 10 pemeriksaan pada 10 entitas pemerintah daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Provinsi Kalimantan Tengah Semester II tahun 2018 tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Ade Iwan Ruswana kepada para Kepala Daerah di Aula BPK Kalteng, Jumat (14/12).

LHP Pemeriksaan Kinerja dan PDTT yang diserahkan BPK Perwakilan Kalteng kepada para Kepala Daerah tersebut terdiri 3 LHP Pemeriksaan Kinerja Dana Desa pada entitas Kabupaten Pulang Pisau, Barito Selatan dan Murung Raya. Kemudian 2 LHP Pemeriksaan Kinerja Pendidikan pada entitas provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten Barito Utara serta 1 LHP Pemeriksaan PDTT Pengelolaan Pengalihan Aset Tetap pada entitas provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk LHP Kinerja dan PDTT provinsi Kalteng Semester II tahun 2018 diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana kepada Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mewakili gubernur Kalimantan Tengah. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja itu bisa mempengaruhi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Waiar Dengan Pengecualiaan (WDP). Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW).

LHP Di dalam Kinerja tersebut, BPK Perwakilan Kalteng menyertakan sejumlah langkah yang harus ditindaklanjuti untuk menyelesaikan catatan-catatan yang dinilai memiliki kekurangan. Kepala BPK Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana menegaskan, iika tidak bisa menindaklaniuti LHP tersebut maka bisa saja mempengaruhi penilaian yang berkaitan dengan Opini WTP atau WDP. "Jika ada permasalahan pada hasil pemeriksaan, ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 sampai 120 hari. Itu belum tentu mempengaruhi WTP, tapi apabila nilainya memang besar dan tidak ditindaklanjuti maka akan berpotensi mempengaruhi Opini WTP", jelas Kepala BPK Kalteng tersebut.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri mengharapkan seluruh **BPK** rekomendasi RI Perwakilan Kalteng ditindaklaniuti termasuk pengalihan aset dapat dilaksanakan tahun 2018."Saya berharap rekomendasi BPK ini dapat membantu pemerintah Kaltena provinsi dalam menyelesaikan seluruh temuan yang terkait dengan pengelolaan sehingga Aset Tetap aset yang dialihkan itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung roda pemerintahan di Kalimantan Tengah", ujar gubernur.

Dijelaskan, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk tim verifikasi fisik dan membuat rencana aksi penyelesaian serah terima aset P3D Pengalihan Personil, Sarana/Prasarana Pendanaan, dan Dokumen (P2D) Kabupaten dan Kota

Bahkan gubernur ingin memastikan beberapa P₃D permasalahan aset barang tidak diketahui seperti keberadaannya dan lebih saji dapat dijelaskan/diverifikasi lebih dulu agar tidak mengganggu pencatatan dalam laporan keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.***



Diguyur Gerimis, Pemprov Kalteng Tetap Khidmat Laksanakan Upacara Bela Negara



Palangka Raya - Biro PKP. Setelah beberapa waktu menunggu dan rintik hujan tidak kunjung reda, upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-70 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 akhirnya tetap dilaksanakan di halaman Kantor pagi (19/12). Gubernur, Rabu hujan gerimis Guyuran dan lapangan yang agak tergenang air tidak menyurutkan semangat para peserta upacara untuk mengikuti jalannya Peringatan Bela Negara ini dengan khidmat.

Peserta upacara vang terdiri dari PNS di lingkungan pemerintah provinsi Kalteng, TNI/ POLRI, Ormas Kepemudaan dan alumni Kader Bela Negara tanpa rasa enggan masuk ke barisan masing-masing. Meski tampak sebagian masih menggunakan payung atau koran. namun begitu upacara dimulai, mereka dengan kesadaran diri segera meletakkannya dan mengikuti upacara dengan baik.

Mengawali amanatnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri selaku Inspektur Upacara secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada para peserta yang telah mengikuti upacara dengan baik dan tertib, biarpun cuaca kurang bersahabat.

"Sebelum membacakan amanat Presiden RI, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para peserta upacara yang sudah mau mengikuti upacara dengan tertib, meskipun kondisi cuaca kurang mendukung", kata Fahrizal Fitri.

Lebih lanjut Fahrizal Fitri menyampaikan ajakan Presiden Republik Indonesia kepada seluruh elemen bangsa agar bersatu padu melaksanakan Aksi Nasional Bela Negara sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing, bangsa Indonesia sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan yang semakin kompleks, demi mewujudkan Negara Indonesia yang berdaulat dan seiahtera.

Presiden RI dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Fahrizal Fitri juga menegaskan Bela Negara tidak bisa hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata semata, namun harus dilakukan melalui beragam upaya dan profesi. Bela Negara tidak bisa hanya dilakukan oleh aparatur negara saja, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama oleh segenap elemen bangsa.

"Bela Negara merupakan wadah peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat, termasuk dunia usaha, dunia pendidikan, media hingga tokoh pemuda dan tokoh agama untuk memberikan sumbangsih kepada negara, melebihi panggilan tugas yang menjadi tanggung jawabnya", tegas Presiden.

Presiden mengajak seluruh elemen bangsa, mewujudkan syukur atas anugerah kemerdekaan serta persatuan dan kesatuan bangsa dengan Aksi Nasional Bela Negara di berbagai bidang. Tugas Bela Negara bukanlah tugas ringan seiring dengan makin kompleksnya tantangan yang dihadapi.

Presiden yakin melalui sinergi antar segenap elemen Indonesia bangsa mampu Indonesia membawa menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Upacara Bela Negara yang mengusung tema "Bekeria dan Bersatu untuk Bela Negara, Tiada Hari Tanpa Negara", ini dihadiri anggota Forum Pimpinan Daerah Koordinasi Provinsi Kalteng, Badan Intelejen Negara Daerah (BINDA) Kalteng, pimpinan instansi vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.***



Gub Kalteng Minta Para Bupati/Walikota Dukung Pembentukan BNN Kabupaten/Kota

PALANGKA RAYA BIRO PKP Berdasarkan hasil Survey Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Puslitdatin BNN RI tahun 2017 tercatat prevalensi penyalahgunaan narkoba di provinsi Kalimantan Tengah sebesar 42 ribu 879 jiwa (1,98 %) dari jumlah penduduk 2.502.630 jiwa, yang tersebar pada 14 kabupaten/kota berada pada urutan ke-5 dari 34 provinsi di Indonesia. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi nasional yakni sebesar 1,77 %.

"Kondisi ini sebagai gambaran yang tentu sangat memprihatinkan. Dalam banyak kasus, rata-rata narkoba dipasok dari perbatasan Malaysia turun ke Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Tengah tempat singgah apabila narkoba akan dibawa ke wilayah Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara. sedangkan zona merah di Kalimantan Tengah sendiri terdapat di Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Kotawaringin dan Kapuas", ungkap Kepala BNN Provinsi kalimantan Tengah Brigjen Pol. Lilik Heri di hadapan peserta Rapat Koordinasi Provinsi Lintas Program dan Lintas Sektor 2018 di Istana Isen Mulang Palangka Raya, Senin pagi (17/12).

Menurut Lilik Heri Setiadi, Rapat Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor yang diikuti Dinas Instansi terkait di tingkat kabupaten dan kota provinsi, tersebut sebagai bentuk komitmen untuk bersinergi bersama terhadap permasalahan narkoba yang mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara, melemahnya perekonomian sendi-sendi dan sosial serta merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Fakta terkini seputar



narkotika di Indonesia diperkirakan 11.071 orang meninggal dunia per tahun akibat narkoba atau 30 orang per hari meninggal dunia karena penyalahgunaan narkoba, meskipun penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 mengalami penurunan mencapai 3,4 juta orang dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,9 juta orang.

"Dengan terbitnya Inpres Nomor: 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tahun 208-2019 sebagai langkah maju untuk menguatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika Indonesia", ujar Kepala BNN kalimantan Provinsi Tengah Brigien Pol. Lilik Heri Setiadi.

Kendala selama ini yang dihadapi BNN Provinsi Kalimantan Tengah antara lain wilayah hukum BNN Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat luas dan minimnya personel yang ada dan dari 14 Kabupaten/Kota di Kalteng baru terbentuk 2 BNN Kabupaten/Kota dan belum mempunyai gedung sendiri. Selain itu. tingginya penyalahguna prevalensi narkoba tidak dibarengi dengan ketersediaan sarana prasarana rehabilitasi sehingga mengakses masyarakat sulit

layanan dan dari 14 Rumah Sakit Kabupaten/Kota hanya RS dr. H. Soemarno Sostro Atmodjo Kuala Kapuas yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi.

Sementara itu qubernur Kalteng dalam sambuta tertulis disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menegaskan Rencana Aksi Nasional P4GN sebagai upaya mencegah penyalahgunaan, peredaran dan prekusor narkotika di Indonesia dan dengan terbitnya Inpres No. 6 Tahun 2018 dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi semua lembaga terkait dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan P4GN.

Gubernur menegaskan penegakan hukum harus lebih diintesifkan dan diintegrasikan dengan upaya pemulihan dan pencegahan. Hal ini untuk pelaku memetakan siapa kejahatan narkoba yang direhabilitasi, siapa yang perlu dipenjara dan siapa yang perlu dipenjara sekaligus direhabilitasi. "Dengan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat serta dukungan Walikota. para Bupati dan maka implementasi rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tahun 2018-2019 dapat terwujud," kata aubernur.

Selain itu, kebutuhan percepatan pembentukan BNN di seluruh Kabupaten/Kota tidak dapat ditawar lagi. "Saya meminta kepada para Bupati yang belum memiliki BNN di wilayah kerjanya untuk segera melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan," gubernur pinta serava menegaskan implementasi Inpres No. 6 tahun 2018 harus didukung seluruh komponen masyarakat dalam rangka menjadikan provinsi Tengah Kalimantan sebagai Provinsi BERSIH DARI NARKOBA (BERSINAR).*

Pemprov Kalteng Dukung Upaya Percepatan Kebijakan Satu Peta

Palangka Rava - Biro PKP Berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung percepatan Kebijakan pelaksanaan Satu Peta (KSP) yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo dalam Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2016. Dengan adanya KSP. seluruh sektor. maka kementerian. lembaga dan daerah akan mengacu pada satu peta integratif vang sama, dengan satu standar informasi geospasial mempermudah sehingga penyelesaian berbagai masalah pemanfaatan tindih tumpang ruang dan penggunaan lahan, mendorong percepatan guna pembangunan.

Sekda Kalteng **Fahrizal** Fitri mengemukakan hal tersebut dalam sambutan tertulis disampaikan Asisten Sekda Kalteng Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy pada Pembukaan Sosialisasi Kebijakan Satu Peta dan Forum Data Simpul Jaringan Informasi Geospasial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 di Aula Kantor Bappedalitbang Kalteng, Senin pagi (10/12/2018).

Fahrizal Fitri mengatakan kebijakan satu peta tersebut juga bertujuan mempercepat dan mempermudah penyelesaian konflik lahan dan batas daerah. "Percepatan Kebijakan Satu Peta bertujuan terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal

guna percepatan pembangunan nasional. KSP ini akan mempercepat dan mempermudah penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan dan batas-batas administrasi daerahdaerah di seluruh Indonesia", tegas Fahrizal Fitri.

Disebutkan, Kalteng berbagai menghadapi kendala pelaksanaan dalam pembangunan. "Kendala dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain adalah kondisi tata ruang sesuai Perda 5 Tahun 2018 dimana kawasan non hutan atau Areal Peruntukan Lain (APL) hanya 18%, sehingga 517 desa dan beberapa infrastruktur masih masuk dalam kawasan hutan. Pemprov Kalteng akan mengusulkan ke Kementerian LHK RI untuk pelepasan kawasan hutan. vang diintegrasikan dalam tata ruang. Tahun 2019 dijadwalkan peninjauan kembali Perda 5 Tahun 2015, dengan komposisi APL sebesar 45%". imbuhnya.

Sekda melalui Asisten II juga menjelaskan beberapa progres dilakukan Pemerintah yang Provinsi Kalimantan Tengah mendukung sebagai upaya percepatan KSP tersebut antara lain: (1) melakukan kerjasama Badan dengan Informasi Geospasial (BIG) tentang pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah: (2) Kesepakatan Bersama BIG tentang Rencana Aksi Daerah Kebijakan Satu Peta Jaringan

Informasi Geospasial Nasional Tingkat Regional Kalimantan Tahun 2018-2019; (3) menyusun regulasi/ kebijakan dan penyiapan infrastruktur guna mendukung penyelenggaraan Simpul Jaringan di Kalteng; (4) melaksanakan bimbingan teknis bagi admin geospasial masing-masing perangkat daerah; (5) inventarisasi permasalahan tumpang antar peta tematik, khususnya sektor tata ruang, pertanahan, kehutanan, perkebunan, ESDM dan perizinan; (6) pengumpulan dan pengolahan data geospasial oleh perangkat daerah.

Usai pembukaan sosialisasi tersebut. dilaniutkan dengan dan diskusi tentang paparan Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Data dan Informasi Geospasial, Ketersediaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi. serta Implementasi Kebijakan Satu Peta dalam Tata Batas Antar Wilavah. Penataan Penyelenggaraan Ruang, Sektor Kehutanan, Sektor ESDM, dan Sektor Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Narasumber yang dihadirkan antara lain Pejabat dari Badan informasi dan Geospasial Pusat Asep Sofvan. Kepala Dinas Kominfosantik Kalteng Herson B. Aden, serta Kepala Biro Setda Pemerintahan Kalteng Akhmad Husain, dan pejabat dari Dinas PUPR. Kehutanan. ESDM, dan Perkebunan Provinsi Kalteng.***



Gub Kalteng : Bupati dan Walikota Jangan Abaikan Fungsi Pengawasan Internal.

Palangka Rava Biro PKP. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bebas diperlukan KKN manaiemen pemerintahan penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel. Disinilah Inspektorat peran diperlukan, sehingga fungsi Inspektorat untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas yang dilakukan Unit Organisasi lain lingkup pemerintah dalam daerah secara efisien, efektif. ekonomis dan tepat sasaran dapat tercapai. "Dengan demikian, Inspektorat dituntut sebagai organisasi pengontrol organisasi lain dan juga sekaligus meniadi contoh atau panutan bagi organisasi lainnya dalam penerapan pemerintahan tata yang baik (Good Governance) dan Pemerintah yang bersih (Clean Government)", ungkap Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Saidina Aliansyah di hadapan peserta Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 di Palangka Raya, Kamis (13/12).

Hasil pengawasan yang berkualitas diharapkan menjadi umpan balik bagi penyelenggara pemerintahan daerah untuk memperbaiki kekurangan maupun kelemahannya. Karena itu seluruh Pegawai Negeri Sipil saat ini dituntut bekerja keras benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta mentaati Peraturan Perundangundangan dan ketentuan yang berlaku. "Pada kesempatan ini, secara khusus saya ingin tekankan kepada Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota agar dapat bekerja profesional dan independen dalam melaksanakan tugas pengawasan dan benarbenar mengutamakan kualitas hasil pengawasan", kata Gubernur Kaltena.

Selain itu, Sugianto Sabran mengingatkan juga Bupati dan Walikota supava tidak mengabaikan fungsi pengawasan internal karena hasil pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten dan Kota dapat menjadi peringatan dini bagi Daerah terhadap suatu masalah terjadi di pemerintahan yang daerah. "Tingkatkan oleh pengawasan Inspektorat dengan memberikan dana yang kesempatan memadai. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Inspektorat, serta jaminan karir yang jelas bagi aparat yang bekerja di Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota", kata Sugianto Sabran.

Sementara itu Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Sapto Nuaroho menjelaskan, Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi kalteng 2018 ini bertujuan menciptakan pola kerja yang bersinergi dengan pelaksanaan pengawasan antara Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota serta aparat pengawasan fungsional lainnya.

Selain itu juga bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan Inspektorat fungsi Provinsi, Kabupaten dan Kota serta meningkatkan pengawasan fungsional agar lebih fokus dan terarah membantu Kepala Daerah mensukseskan pembangunan daerah masing-masing, menyamakan persepsi pemahaman tentang pengawasan terpadu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. serta menetapkan program kerja pengawasan tahun 2019.

Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Kalteng 2018 itu menghadirkan nara sumber Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Perwakilan **BPKP** Provinsi Kalimantan Tengah serta Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.***



DPRD dan Pemprov Kalteng Setujui 3 Raperda Ditetap Menjadi Perda

Palangka Raya - Biro PKP. Kalimantan **DPRD** Provinsi Tengah dalam rangka mengakhiri Masa Persidangan Tahun 2018 menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Kalteng dengan Pemda Kalteng dalam pembahasan 3 buah Raperda Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Raperda tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Retribusi Jasa Umum serta Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sekaligus Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018 di Palangka Raya, Kamis (20/12).

Juru Bicara DPRD Provinsi Kalteng dalam Rapat Paripurna tersebut HM.Anderiansyah menyatakan sepakat atas hasil pembahasan terhadap 3 buah Raperda tersebut. Namun HM. Anderiansyah menjelaskan pihak Dewan meminta Tim A yang yang membahas Raperda Provinsi Kalteng tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah agar

medorong Pemerintah Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup untuk membuat Peraturan Daerah tersendiri tentang limbah dan penegakkan hukumnya.

Sementara Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam Pidato Pendapat Akhir yang dibacakan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyambut positif atas persetujuan bersama **DPRDdanPemdaKaltengterhadap** 3 Raperda tersebut. "Saya optimis dengan ditetapkannya Raperda tentang Sistem Penyelenggaran Kesehatan Provinsi ini nanti menjadi Perda, maka masyarakat Kalteng dapat meningkat taraf kesehatannya sesuai tujuan Kalteng Berkah", jelas Sugianto Sabran.

Demikian terhadap juga Raperda Retribusi Jasa Umum nantinva setelah ditetapkan meniadi Perda diharapkan layanan dapat meningkatkan pemerintah manfaatnya dan dirasakan oleh masyarakat serta meningkatkan dapat **PAD** berdampak sehingga positif terhadap pembangunan

Kalimantan Tengah, Kemudian Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) merupakan suatu kebijakan penting yang diambil di bidang pemanfaatan ruang di laut. "Kebijakan ini tentu arah tujuan prioritasnya dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Kita semua yakin sumber daya laut kita melimpah, hanya saja belum dimanfaatkan secara maksimal karena terkendala aturan mengenai penatarungan laut". ungkap Sugianto Sabran.

Dengan ditetapkannya Raperda ini nantinya diharapkan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Kalteng akan menjadi lebih makmur sehingga Kalteng BERKAH dapat terwujud di seluruh wilayah termasuk di wilayah pesisir Kalimantan Tengah. "Semuanya ini merupakan wujud nyata dan kerjasama semua pihak untuk berperan aktif dalam percepatan pembangunan Kalimantan Tengah dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat", ujar Gubernur Kalteng.**

Ribuan ASN Lingkup Pemprov Kalteng Peringati HUT KORPRI 2018

Palangka Raya – Biro PKP. Ribuan Aparatur Sipil Negara lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Tengah memperingati Hari Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tahun 2018 di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (29/11).

Peringatan Ultah Ke-47 KORPRI 2018 mengusung thema "KORPRI Melayani, Bekerja dan Menyatukan Bangsa" itu dengan Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri. Presiden RI Joko Widodo selaku Penasehat Nasional **KORPRI** dalam sambutan tertulis dibacakan Fahrizal Fitri menyampaikan penghargaannya kepada keluarga besar KORPRI atas pengabdian kepada bangsa, negara dan rakyat di seluruh penjuru tanah air.

Menurut Presiden, tema "Korpri Melayani, Bekerja dan Menyatukan Bangsa", ini menjadi pengingat agar KORPRI tetap netral. "Hal ini menjadi pengingat agar pegawai selalu netral dan profesional terutama menghadapi tahun politik 2019 dan dalam

menerapkan Panca Prasetya pengabdian Korpri dimana anggota KORPRI bukanlah kepentingan kelompok maupun individu, melainkan pengabdian anggota **KORPRI** hanyalah Negara, Bangsa dan kepada Rakyat", tegas Presiden Joko Widodo

peringatan Pada **HUT** Presiden KORPRI tahun ini, Jokowi kembali mengingatkan tentang pemberantasan praktek korupsi dan pungli. Menurut Presiden, memenangkan global kompetisi dengan pelayanan publik yang prima di mana anggota KORPRI berada di garis depan perjuangan sehingga dibutuhkan anggota Korpri yang disiplin, bertanggungjawab dan berorientasi kerja dengan meninggalkan pola pikir masa lalu seperti ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa dan koruptif yang hanya mental terpaku pada formalitas belaka.

Presiden juga mengajak anggota KORPRI harus memfokuskan energi pada intisari dari pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. "Untuk itu setiap anggota KORPRI haruslah menjadi bagian dari solusi bangsa dengan terus melakukan inovasi-inovasi agar pelayanan publik bisa makin murah, cepat, akurat dan makin baik serta hilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktifitas menghambat dan akselerasi pembangunan nasional, bukan sebaliknya anggota **KORPRI** menjadi bagian dari masalah bangsa", terang Presiden Jokowi

KORPRI akan segera bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Republik Indonesia. Negara Transformasi ini tentunya akan merubah fungsi pemerintahan yang diemban dalam bentuk pembinaan dan pengembangan profesi Aparatur Sipil Negara, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota ASN, memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran Etik dan standar profesi serta kesejahteraan meningkatkan anggotanya.***

Gubernur Kalteng Optimis Penerimaan PKB dan BBNKB Tercapai 100 %

PALANGKA RAYA - BIRO PKP. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Kendaraan Bermotor Nama (BBNKB) berdasarkan target pendapatan daerah tiap tahun meningkat pada kisaran angka 2 % - 4 %. "Kita patut bersyukur realisasi karena penerimaan PKB dan BBNKB telah mencapai Rp.554.766.697.314,- atau 95%. Mudah-mudahan sampai akhir tahun 2018 mencapai 100 %", gubernur Kalimantan ungkap H. Sugianto Sabran Tengah dalam sambutannya disampaikan Ahli Gubernur Bidana Pemerintahan. Hukum dan Politik Endang Kusriatun ketika membuka Rapat Koordinasi Tim Sistem Pembina Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Kalteng 2018 di Palangka Raya, Senin pagi (10/12).

Sugianto Sabran pun optimis target PKB dan BBNKB tahun 2019 naik pada kisaran angka 3,7 % atau senilai Rp. 21.981.190.000,menegaskan tuntutan seraya kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depannya menjadi hal yang mutlak terkait kemandirian dengan daerah. "Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, akan semakin ketergantungan kecil kepada Pemerintah daerah Pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat diharapkan Pemerintah Daerah semakin mampu membiayai keuangannya dan memperhatikan peningkatan kebutuhan belanja untuk masyarakat. kepentingan sehingga perlu adanya penguatan peran Pendapatan Asli Daerah," beber Sugianto Sabran.

Upaya penguatan dapat dilakukan melalui sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi program kegiatan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, terutama kerja sama instansi di dalam Samsat. Penguatan tersebut menurut gubernur perlu dilakukan secara terus-menerus melalui intensifikasi

dan ekstensifikasi semua Objek Pendapatan Daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peran PKB dan **BBNKB** dalam menunjang pembangunan di Kalimantan Tengah sangat vital, bahkan laju pembangunan Kalimantan Tengah masih bergantung dengan penerimaan pajak daerah yang komponen utamanya antara lain PKB dan BBNKB. "Pentingnya peranan PKB dan BBNKB menjadi garda terdepan dalam menggerakan laju roda pembangunan di Kalimantan Tengah menuju Kalteng Berkah. Untuk itu, kerja sama dan sinerjitas dalam Tim Pembina SAMSAT juga harus semakin ditingkatkan," pesan Gubernur Kalteng.

Upaya pengawasan dan penertiban terhadap obyek paiak PKB dan BBNKB masih memerlukan pendekatan dan wawasan kepada penanaman masyarakat sebagai wajib pajak tentang pentingnya peran terhadap kelangsungan pembangunan semua sektor di Kalteng. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Gubernur menegaskan upaya peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB merupakan tugas dan tanggung jawab bersama sehingga memerlukan dukungan dan partisipasi semua pihak. "Hubungan antar instansi pemungut sumber-sumber

pendapatan daerah yang ada di provinsi, kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah, maupun instansi vertikal dan upaya-upaya lainnya berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan untuk mewujudkan Kalteng Berkah ". terang gubernur.

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain harmonisasi kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah dan Jasa Raharja yang mengutamakan aspek kualitas pelavanan terhadap dengan masyarakat menyederhanakan persyaratan kendaraan registrasi bermotor daftar ulang tahunan. Selain melakukan koordinasi dan perkembangan memantau penerimaan pajak daerah serta menyusun proaktif kebijakan dan regulasi dengan melibatkan unsur legislatif sehingga akan berdampak dalam peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB.

Rakor dengan tema "Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Melalui Kegiatan Samsat" itu diikuti Kasat Lantas se-Kalteng, Kepala UPT dan Kasi Penetapan Pajak di UPT se-Kalteng serta Pejabat ASN Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng, yang dihadiri Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalteng, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Kalteng, Kepada Badan Pendapatan Provinsi Kalteng dan Perwakilan Jasa Raharja Palangka Raya.*



Direktur Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Arsan Latif Tegaskan PERGUB Kalteng No.16 tahun 2018 Sah



Palangka Raya Biro PKP. Pendapatan Daerah bersumber dari tiga kelompok meliputi Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Darah Yang Sah. Ketiga Kelompok Sumber Pendapatan Daerah itu terus dioptimalkan penerimaannya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah meningkatkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri menegaskan upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah tersebut memerlukan strategi dan kebijakan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota termasuk dengan pihak perusahaan yang melakukanusahanyadiKalimantan Tengah, "Hal itu sesuai dengan salah satu misi utama dalam RPJM Provinsi Kalteng tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah untuk meningkatkan volume APBD setiap tahunnya", beber Fahrizal Fitri dalam acara "Focus Group Discussion" Legitimasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.16 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pengelolaan Penerimaan dan atau Sumbangan Hibah Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kalimantan Tengah Dalam Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (19/12).

Fahrizal Fitri juga mengungkapkan kegiatan Group Discussion Focus dimaksudkan untuk mencari solusi peningkatan pembangunan Kalteng melalui pengelolaan dana yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa Sumbangan Pihak Ketiga, sedangkan tujuannya mengetahui Legitimasi Peraturan Gubernur No.16 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Pengelolaan Hibah atau Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Dasar Pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga.

FGD tersebut diikuti Forkopimda, Perangkat Daerah Provinsi. Tim Percepatan Pembangunan Kalteng, para Bupati dan Walikota, Kepala Badan Pendapatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah se-Kalteng, Akademisi PTN/PTS, Mitra Kerja Perusahaan Pemda, Daerah, Pengusaha Sektor Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan termasuk pengusaha penyedian BBM dengan nara sumber Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Jenderal Keuangan Direktorat Kementerian Dalam Daerah Negeri Arsan Latif.

Menurut Arsan Latif,

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 2018 tersebut tidak ada persoalan dari sisi hukum. "Jadi Peraturan Gubernur ini tidak ada persoalan dari sisi hukum dan sudah melalui mekanisme evaluasi dari Kemendagri", tegas Arsan Latif.

Dijelaskannya, berdasarkan Nomor.58/2005 tentana Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pendapatan Daerah itu harus memiliki Dasar Hukum. Sumber Pendapatan dari Hibah atau Sumbangan Pihak Ketiga itu jelas diatur dalam UU, PP maupun Permendagri. "Hibah itu sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat, yang masuk kelompok dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dengan demikian, sebenarnya tanpa Peraturan Gubernur ini pun sumbangan itu tetap sah adanya", Direktur Perencanaan beber Anggaran Daerah Dirien Keuangan Daerah Kemendagri tersebut.

Sementara gubernur itu Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menegaskan Kalimantan Tengah memerlukan bantuan dan perhatian semua kalangan termasuk dari pengusaha. Tujuan utama dikeluarkannya Pergub tersebut untuk membantu pembangunan Kalteng."Dana tersebut langsung masuk ke ke Kas Daerah dan digunakan untuk penguatan infrastruktur. pendidikan, kesehatan dan lainlain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, bukan untuk pribadi", kepentingan tegas gubernur Kalteng itu.***



TPID Kalteng Luncurkan Program Inovasi "Suply Chain Daging Avam Beku".



Palangka Raya - Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah meluncurkan Program Inovasi TPID Provinsi Kalimantan Tengah yaitu "Pembentukan Supply Chain Daging Ayam Beku" dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga daging ayam menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Palangka Raya, Selasa (04/12).

Peluncuran Program Inovasi TPID ini dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Kepala Perum Bulog Drive Kalteng dan Kepala SOPD Anggota TPID Provinsi Kalteng.

Wakil gubernur Kalimantan Habib H.Said Ismail Tengah ketika meluncurkan Program Inovasi TPID Kalimantan Tengah menegaskan program inovasi **TPID** "Pembentukan Supply Chain Daging Ayam Beku" ini sebagai Buffer Stock Daging Ayam Segar yang didasari pada situasi dimana komoditas daging ayam ras merupakan komoditas yang paling fluktuatif di Kalteng

dan menjadi penyumbang inflasi tertinggi, namun juga menjadi penyumbang deflasi terdalam di provinsi Kalimantan Tengah. "Fluktuasi harga daging ayam ras di Kalteng disebabkan beberapa faktor antara lain masih tingginya kebutuhan konsumsi daging ayam ras yang dipenuhi oleh pasokan dari peternak di luar wilayah Kalteng dan masih tingginya konsumsi ketergantungan masyarakat terhadap jenis daging ayam segar, sehingga diperlukan suatu solusi untuk mengatasi situasi tersebut", beber Wagub Kalteng Habib H.Said Ismail.

Untuk mengatasi situasi

tersebut TPID Provinsi Kalteng terus berupaya melakukan terobosan-terobosan dan koordinasi yang intensif dalam rangka menjaga kestabilan harga, khusus komoditas daging ayam ras.

Program Inovasi ini diawali High Level dengan Meeting Terbatas yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2018 yang menghasilkan rekomendasi BI, Bulog dan SKPD terkait untuk membentuk "Supply Chain Daging Ayam Beku" sebagai alternatif konsumsi masyarakat Kalteng yang dipasok oleh peternak lokal dengan memperhatikan prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

Program Inovasi diharapkan dapat terus berjalan berkesinambungan secara sehingga Kalteng bisa secara memproduksi mandiri daging ayam ras, bahkan dapat menjadi Sentra Produksi Daging Ayam Kalimantan Beku Regional. Tengah Bulan Novemver 2018 mengalami deflasi minus 0,05% (mtm) atau turun dari tekanan inflasi bulan Oktober 2018 dengan deflasi sebesar 0,19% (mtm) sehingga capaian inflasi Kalteng berada dibawah capaian inflasi nasional sebesar 0,27% (mtm).***



Builetin Isen Mulang

Wagub Kalteng Beberkan Keberhasilan Pembangunan Kalteng Tiga Tahun Terakhir.

PALANGKA RAYA - BIRO PKP. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan bangsa yang harus dihadapi dan diselesaikan sehingga memerlukan langkahlangkah penanganan dan pendekatan yang sistematik. terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara lavak negara untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Untuk itulah diperlukan penanggulangan program yang kemiskinan dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial. pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Sehubungan dengan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota secara berkala melakukan rapat koordinasi kemiskinan penanggulangan provinsi Kalimantan Tengah yang dihadiri para bupati/walikota dan dinas instansi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Kalteng.

Wakil gubernur Kalimantan Tengah Habib H.Said Ismail ketika membuka Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng 2018 di Palangka Raya, Kamis (29/11) membeberkan berbagai keberhasilan dan permasalahan pembangunan di Kalimantan Tengah selama 3 tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

Wakil gubernur Kalteng
Habib H. Said Ismail mengatakan
kemiskinan merupakan
permasalahan mendasar
yang selalu ada dan terjadi
dalam kehidupan. "Pemerintah
kewajiban merancang, menyusun

strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat", jelas Wagub.

Disebutkan. pertumbuhan ekonomi Kalteng tahun 2017 mencapai 6,74 % bahkan pada triwulan I tahun 2017 ekonomi tumbuh 9.49%. merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah dicapai provinsi Kalteng. Inflasi 2017 sebesar 3,15 %, rendah dari tahun 2015 sebesar 4.74 % bahkan iauh di bawah inflasi nasional. Angka kemiskinan tahun 2017 tercatat 5,26 %, lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 5,91 % sehingga menempatkan provinsi Kalteng urutan nasional tingkat kemiskinan paling rendah", terang Wagub.

Demikian juga **RAPBD** mencapai 5,5 Trilyun lebih, melampaui target RPJMD sebesar 4,2 Triilyun. Peningkatan cukup signifikan ini dipengaruhi oleh pendapatan daerah vang mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir pada kisaran 500 Milyar. Sektor pariwisata pada Oktober 2018 Taman Nasional Taniung Putina Kabupaten Kotawaringin Barat disinggahi 70 yacht yang diharapkan mampu mempopulerkan Kalimantan Tengah di tingkat dunia sebagai salah satu destinasi wisata.

Sektor pertanian sampai September 2018 beberapa komuditas melampaui target produksi seperti padi mencapai 783.560 ton, jagung 158.965 ton dan kedelai mencapai 1.413 ton.

Sementara itu sejumlah program kegiatan yang dilaksanakan ke depan sebagai bentuk kemitraan bersama antara

lain bidang pendidikan untuk peningkatan mencapai akses dan mutu pendidikan SMA/SMK/ SLB berupa pembangunan 55 unit Ruang Kelas Baru, 12 unit perpustakaan, 20 unit laboratorium dan 28 unit ruang praktek siswa. Pemprov Kalteng tahun 2018 juga kembali mengangkat Guru Tidak Tetap (GTT) sebanyak 2.684 orang dengan insentif Rp 1.500.000/bulan dalam rangka memenuhi kebutuhan guru SMA/ SMK/SLB.

Pemerintah provinsi juga memprogramkan pembangunan rumah sakit pemerintah Klas A dan telah disusun masterplan serta studi kelayakakannya yang dilanjutkan tahun 2019. Tercatat total cakupan peserta JKN-KIS saat ini 1.830.714 jiwa, JKN melalui Kartu Kalteng Berkah tercatat 10.000 jiwa dengan total premi 2,7 Milyar.

Pemerintah provinsi Kalteng mengupayakan juga terus beberapa program perlindungan sosialantaralain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Jaminan Kesejatan Nasional (KIS-PBI) dan Program Indonesia Pintar (KIP). "Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan pemikiran dan solusi terbaik bagi upaya penanggulangan percepatan kemiskinan di Kalimantan Tengah", ujar Wagub.

Gubernur Kalimantan telah Tengah menerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai penghargaan atas upaya-upaya memberikan kemajuan pembangunan negara dan pembinaan koperasi/UMKM di Kalimantan Tengah.***

Pertemuan Tahunan BI Perwakilan Kalteng 2018

Palangka Rava - Biro PKP. Indonesia Perwakilan Bank Kalimantan Tengah menggelar Pertemuan Tahunan dengan tema "Sinergi Untuk Ketahanan dan Pertumbuhan" yang diikuti Kepala Bank se-Kalteng dan Sekda Kalteng, Unsur Forkopimda, Pengadilan Kabinda, Ketua Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Ombudsman Kalteng, Bupati dan Walikota, Kepala Instansi Vertikal Pemerintah atau Non Pemerintah, **DPRD** Ketua Kabupaten/Kota se-Kalteng, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalteng serta Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Partai Politik dan Insan Pers di Palangka Raya, Selasa (18/12).

Dalam Pertemuan Tahunan Perwakilan Kalteng RI 2018 itu Gubernur Bank Indonesia membeberkan situasi dan kondisi perekonomian Indonesia terkini. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam sambutanya disampaikan Kepala BI Perwakilan Kalteng Wuryanto mengungkapkan munculnya disebabkan ketegangan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dengan negara khususnya Tiongkok dan ditambah kenaikan suku bunga Bank Sentral AS atau The Fed. "Kondisi tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian global sehingga sinergi memerlukan kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, OJK dan para mitra kerja lainnya untuk memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi", beber Gubernur BI Perry Warjiyo.

Dijelaskan, pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 diperkirakan melandai karena



menurunnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat serta melandainya pertumbuhan ekonomi Uni Eropa dan Tiongkok. Selain itu, rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS yang akan diikuti normalisasi kebijakan moneter di Uni Eropa sejumlah negara lainnya. "Hal ini diperparah lagi dengan munculnya ketegangan perdagangan antara AS dengan sejumlah negara lain khususnya Tiongkok yang berdampak pada ketidakpastian di pasar keuangan global," jelasnya.

Sementara gubernur itu Kalteng dalam sambutannya Sekda disampaikan Kaltena Fitri Fahrizal mengharapkan Pertemuan Tahunan BI Perwakilan Kalteng ini memberikan manfaat untuk mewujudkan dan mencapai Visi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Disebutkan, pertumbuhan ekonomi Kalteng akhir tahun 2018 pada level cukup baik yaitu di atas pertumbuhan nasional dan provinsi lain di pulau Kalimantan. "Hal ini merupakan buah kerja dan koordinasi antara keras Pimpinan Daerah, SKPD, Bank Indonesia, Perbankan dan juga lembaga lain. Namun perlu disadari pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah sebagian besar masih didominasi kekuatan Sumber Daya Alam dan ekspor bahan mentah", beber gubernur Kalteng.

Pemerintah provinsi Kalteng terus berupaya mengurangi ketergantungan pertumbuhan ekonomi dari potensi Sumber Daya Alam dengan mengembangkan potensi sumber daya ekonomi baru yang lebih inklusif dan langsung menyentuh masyarakat. Salah satunya Temu Akbar 1000 UMKM yang diprakarsai Dinas Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan Bank Indonesia beberapa waktu lalu.

Selain itu diperlukan koordinasi dalam pengendalian inflasi mengingat target inflasi yang ditetapkan pemerintah tahun 2018-2020 sebesar 3,51 %, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Selain menghadapi tantanan dalam menjaga stabilitas harga, kita juga menghadapi tantangan struktural yang harus kita selesaikan bersama untuk mendorong pembangunan daerah", ungkap gubernur.

Pertemua Tahunan ΒI Kalteng ini juga diharapkan dapat menjadi wadah media komunikasi Pemerintah Daerah. Indonesia dan lembaga lainnya dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang rendah dan stabil, kondisi sistem keuangan yang sehat dan stabil, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang rendah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.***

Gub Kalteng : Sumber Daya Genetik Spesifik Lokal Harus Dilindungi Dari Kepunahan

PALANGKA RAYA - BIRO PKP. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi memiliki Indonesia vand keanekaragaman hayati sangat banyak. Tidak kurang dari 15.000 jenis tumbuhan berbunga seperti pangan, hortikultura dan lainnya ditemukan di Kalimantan. Selain itu juga terdapat 5.000 jenis pohon dengan 267 jenis dipterocarpus serta 44 jenis mamalia dan 13 jenis primata yang hanya terdapat di pulau Kalimantan.

Demikian iuga dengan hortikultura tercatat beberapa ienis buah-buahan langka seperti maritam/tanggaring, untit, kalangkala, paken, binjai madu, rambai dan layung yang dijual warga masyarakat pada tibanya musim buah-buahan. Di perairan gambut juga ditemukan ikan-ikan lokal misalnya gabus/ behau, betok/papuyu, sepat siam, gurame/kalui atau karuh, toman dan lele lokal/keling.

Semuanya itu merupakan kekayaan plasma nutfah atau Sumber Daya Genetik Kalimantan yang bermanfaat bagi kehidupan secara berkelanjutan. Plasma Nutfah sebagai Sumber Daya Genetik adalah bahan tumbuhan, hewan dan atau jasad renik sebagai bahan dasar untuk merakit varietas unggul yang produktivitas mempunyai sifat tinggi, tahan hama-penyakit dan mutu yang sesuai dengan selera masyarakat.

Namun sampai saat ini baru sebagian kecil Sumber Daya Genetik yang telah dimanfaatkan untuk merakit vairetas unggul dan pemanfaatan lainnya. Disinilah BPTP dituntut perannya sebagai sebuah lembaga yang melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Plasma Nutfah sangat banvak dan tersebar Kalimantan Tengah. "Pengelolaan plasma nutfah berupa flora dan sangat penting menyangkut kekayaan yang harus kita lindungi. BPTP telah melakukan pengelolaan SDG yang ada melalui inventarisasi/ ekplorasi SDG. perlindungan dan pemanfaatannya," Ketua BPTP Kalimantan Tengah Fery Fahrudin dalam pertemuan pengelola SDA Genetik Spesifik dan Konsolidasi Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Kalteng di Palangka Raya, Selasa (04/11).

Kalimantan Tengah juga di bidang memiliki kekayaan pangan misalnya jenis padi lokal seperti Siam Unus, Siam Adil, Siam Kuning, Siap Epang, Karang Dukuh, Siam Gunung, Mutiara, Brenti dan Beras Merah yang sangat disukai dan rasanya enak dengan harga jual padi lokal relatif lebih tinggi. "BPTP telah inventarisasi melakukan lebih dari 100 aksesi padi lokal yang tersebar di Kalimantan Tengah dan sebagian sudah diamankan melalui penyimpanan Bank Gen di Balai Besar SDG Kementerian Pertanian" jelas Fery Fahrudin.

Gubernur Kalimantan

Tengah dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Nurul Edv membuka Pertemuan ketika Pengelolaan Sumber Daya Genetik Spesifik Kaltena dan Konsolidasi Komisi Sumber Daya Genetik Kalimantan Tengah menekankan pentingnya masyarakat mengembangkan dan memanfaatkannya sumber daya genetik lokal, sehingga akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesehatan masvarakat, "Penting bagi kita untuk mengetahui keberadaan dan melakukan perlindungan sumber daya agar genetik tersebut tidak musnah dan tetap pendaftaran lestari termasuk varietas tanaman lokal ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman juga penting sebagai pengakuan kepemilikan kita terhadap kekayaan plasma nurfah yang ada di Kalteng", tegas gubernur Kalteng Sugainto Sabran.

Dijelaskan, saat ini ikon spesifik tanaman khas Kalteng berupa Bawang Dayak sudah sebagai popular sangat tanaman obat asli Kalimantan Tengah. Bahkan sudah banyak rumah industri tangga yang mengembangkannya dan didukung oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Provinsi Tengah melalui Pusat Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO sehingga industri pemanfaatan sumber daya genetik lokal ini akan benar-benar bermanfaat.***

Gub Kalteng : Restorasi Gambut Tidak Boleh Menimbulkan Konflik

Palangka Raya -Biro PKP. Pengelolaan dan penanganan lahan gambut menjadi tanggung iawab pemerintah daerah melalui Badan Restorasi Gambut (BRG). Hal ini sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut daerah-daerah yang mempunyai lahan gambut cukup luas, termasuk provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah mendapat tugas pembantuan untuk kegiatan restorasi gambut tahun anggaran 2018. Tugas pembantuan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.61/Menlhk/ Setien/Kum.1/11/2017 tentana Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kegiatan restorasi gambut tahun anggaran 2018 melalui Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemanfaatan lahan gambut dapat dilakukan pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung melalui kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan menjaga fungsi hidrologi gambut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

"Badan Restorasi Gambut telah melakukan restorasi gambut di beberapa kabupaten yang masuk prioritas restorasi gambut meliputi kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Barito Selatan, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringi Barat dan Sukamaran", beber gubernur

Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika membuka Rapat Koordinasi Restorasi Gambut Provinsi Kalteng 2018 di Palangka Raya, Kamis pagi (06/11

Gubernur mengaskan rusak lahan gambut yang harus direstorasi. "Namun ekosistem gambut yang telah rusak akibat kebakaran pemanfaatan budidaya yang tidak memperhatikan fungsi ekosistem gambut, harus dihentikan. Lahan gambut yang telah rusak harus segera direstorasi agar berfungsi kembali sebagai konservator air", tegas Sugianto Sabran.

Menurut gubernur, restorasi hidrologi gambut yang telah dan akan dilakukan pada semua KHG gambut di wilayah Kalimantan Tengah diharapkan dapat menaikkan tinggi muka tanah gambut setinggi mungkin, sehingga akhirnya dapat membasahi gambut untuk mengurangi resiko kebakaran dan meningkatkan kelembaban tanah untuk pertumbuhan vegetasi dan menurunkan emisi gas rumah

kaca. "Karena itu kegiatan restorasi hidrologi lahan gambut harus mengikuti tahapan yang benar dan tepat dengan tetap melibatkan masyarakat lokal, jangan sampai malah menimbulkan konflik dan menghilangkan hak akses masyarakat", tegas Sugianto Sabran.

Gubernur Kalteng juga meminta semua bupati dan walikota agar menjaga semua infrastruktur pembasahan gambut yang telah dibangun oleh BRG seperti sekat kanal dan sumur bor serta mengkaji kembali proyekproyek di lokasi gambut yang justru bersifat kontradiktif seperti pembangunan kanal, pembuatan drainase/saluran bawah tanah.

Selain itu perlu terus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang telah ikut dalam revitalisasi program ekonomi yang dikembangkan BRG dan TRGD Provinsi Kalimantan Tengah."Pengawasan secara ketat terhadap perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Gambut Zona Budidaya, terutama kewajiban menjaga tinggi muka air sesuai amanat perundangundangan yang berlaku", terang gubernur.***



Gub Kalteng : Keluarga, Penentu Pembentukan Kematangan Anak

PALANGKA RAYA - BIRO PKP. Keluarga merupakan awal mula pembentukan kematangan individu dan struktur kepribadian Untuk itu memerlukan anak. adanya kesadaran yang dapat mendorong keluarga Indonesia memiliki pengasuhan agar berkualitas. berwawasan. yang keterampilan dan pemahaman komprehensif dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Peringatan Anak Hari Nasional merupakan momentum penting. strategis dan vang monumental dalam upaya meningkatkan hak asasi dan kehormatan terhadap anakanak di Indonesia, khususnya di provinsi Kalimantan Tengah, serta meningkatkan kesadaran seluruh komponen masvarakat terhadap anak sebagai generasi penerus cita- cita perjuangan bangsa.

"Saya berharap momentum Hari Anak Nasional tingkat provinsi Kalimantan Tengah 2018 ini dapat inspirasi memberikan dalam membangun komitmen yang kuat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha termasuk media untuk membangun provinsi Tengah Kalimantan menjadi wilayah yang ramah kepada anakanak", ungkap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri pada Peringatan Hari Anak Nasional 2018 di Bundaran Besar Palangka Raya, Minggu pagi (16/12).

Peringatan Hari Anak Nasional ini bertujuan agar seluruh komponen bangsa Indonesia yang meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga orang tua dapat bersama-sama mewujudkan kesejahteraan anak dengan menghormati hak-hak anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhannya tanpa perlakuan diskiriminasi.

Forum anak sebagai wujud

terpenuhinya hak-hak anak atau hak berpartisipasi telah terbentuk di 14 Kabupaten dan Kota se-Kalteng. " Saya berharap agar forum ini dapat terus dibina oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sehingga dapat memberikan wadah kepada anak - anak untuk berkreasi dan berpendapat rangka berkontribusi dalam proses secara optimal dalam pembangunan provinsi Kalimantan Tengah. Saya juga berharap agar kualitas dan kuantitas Program Pemenuhan dan Perlindungan ditingkatkan, Anak terus misalnya penanganan anak yang berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus, anak sebagai pelopor dan pelapor serta berbagai program yang menyangkut anak - anak. terus mendapat perhatian Gubernur Kalteng.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Berencana Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah dr. ADM Tangkudung mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tersebut sebagai salah mensosialisasikan upaya dan memberikan berbagai informasi keluarga, masyarakat, dunia usaha tentana dan pemenuhan hak dan perlindungan anak. memberikan informasi kepada masyarakat dan keluarga tentang pentingnya membangun karakter anak melalui peningkatan pengasuhan keluarga guna mempercepat penanaman nilainilai kebangsaan.

"Peringatan Hari Anak Tahun ini juga sebagai momentum penting untuk mendorong peningkatan komitmen tentang kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, keluargadanorangtua dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta

mendorong pengembangan kabupaten dan kota layak anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak", beber dr. ADM Tangkudung.

Peringatan HAN 2018 ini juga dimanfaatkan Forum Anak Daerah melakukan Deklarasi Suara Anak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018. Isi deklarasi itu Pertama, memohon kepada pemerintah untuk mewajibkan Forum Anak ikut serta dalam Musrenbang tingkat daerah serta merealisasikan dan memonitoring hasil Musrenbang anak tersebut. memohon Kedua. kepada pemerintah membuat regulasi terkait pelarangan penggunaan plastik di pusat perbelaniaan. Ketiga, memohon kepada pemerintah untuk memonitoring iklan promosi sponsor segala jenis rokok dan menuntut pemerintah agar mengawasi pengedaran Napza di lingkungan sekolah dan masyarakat. Keempat, memohon kepada pemerintah untuk lebih optimal dalam mensosialisasikan **Undang-Undang** baru yang ditetapkan tentang batas usia perkawinan kepada lembaga terkait dan memonitorina hasilnya, dan Kelima, memohon kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan dan kesehatan sampai ke daerah pelosok.

Melalui Peringatan Hari Anak 2018 diharapkan kepada orang tua agar dapat dan termotivasi menumbuh kembangkan potensi anak sesuai dengan minat dan bakatnya, menciptakan lingkungan yang aman nyaman, menghargai pendapat anak dan mencegah kekerasan terhadap anak serta menanamkan akhlak yang mulia dalam rangka mewujudkan anak Kalimantan Tengah yang sehat, cerdas. tangguh dan mandiri serta dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.***

Gubernur Kalteng Kukuhkan Bunda PAUD Provinsi dan Kabupaten se-Kalteng

PALANGKA RAYA - BIRO PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengukuhkan Yulistra lvo Sugianto Sabran sebagai Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Tengah dan 12 Bunda PAUD Kabupaten se-Kalimantan Tengah di Ruang Pertemuan Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya Rabu (05/12). Pengukuhan Bunda PAUD tersebut dihadiri Direktur Jenderal **PAUD** Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Bupati se-Kalimantan Tengah dan 300 anak PAUD dari Kota Palangka Raya.

Keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dan strategis penting dalam membina tumbuh kembang anak secara optimal. PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. Upaya ini diharapkan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan saat memasuki pendidikan lebih lanjut.

Bunda **PAUD** Provinsi Kalimantan Tengah Yulistra Sugianto Sabran usai pengukuhannya sebagai Bunda PAUD Kalteng menegaskan anak merupakan aset negara yang kelak akan memikul tanggung jawab kelangsungan kehidupan negara dan bangsa. "Sejak usia dini anak dibekali dengan pendidikan dan nilai-nilai baik, maka kelak anak akan mampu mengenalikan mengembangkan yang ada pada dirinya. Dengan demikian mereka akan dapat menyumbangkan potensinya untuk kemajuan bangsa dan negara sehingga mampu bersaing di era globalisasi", ungkap istri Gubernur Kalteng tersebut.

Yulistra Ivo membeberkan lebih rinci 4 tugas pokok dan

fungsi Bunda PAUD, dua di antaranya adalah pertama, mensosialisasikan dan memotivasi para pengelola, guru PAUD, masyarakat perorangan atau kelompok dan orang tua akan arti penting pendidikan anak usia dini. Kedua, mendukung program pemerintah pusat, provinsi dan daerah di dalam mewujudkan "Satu Desa Satu program PAUD" dengan tolak ukur angka partisipasi PAUD.

Otak berkembang dengan sangat cepat pada usia dini. Otak dapat menerima dan menyerap segala sesuatu vang dilihat dan didengar termasuk hal baik maupun kurang baiki. "Masa itu adalah masa-masa di mana perkembangan fisik, mental dan spiritual seorang anak akan mulai terbentuk. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan ini adalah masa golden age atau usia emas bagi seorang anak", ungkap gubernur Sugianto Sabran.

Para Bunda PAUD juga memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan setiap anak yang lahir memiliki identitas berupa akta kelahiran agar mereka dapat menjadi Warga Negara Indonesia yang terlindungi hak-haknya sejak dini.

Sementara itu Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan Bunda PAUD harus dapat mendorong orang tua agar berpartisipasi dalam kegiatan bina keluarga balita. Pelibatan orang tua dalam penyelenggaraan pembelajaran di satuan-satuan PAUD menjadi hal yang sangat penting dilakukan sehingga cara pengasuhan yang disampaikan di PAUD dapat diadaptasikan dengan pola pengasuhan anak di rumah.

Gubernur Sugianto juga berpesan kepada para orang tua agar tidak membiarkan anak mengkonsumsi berita maupun tingkah laku yang tidak tepat untuk anak-anak. "Tanggung jawab para orang tua agar lebih berhati-hati, jangan pernah berkata kasar di depan anak-anak, karena itu akan terekam dalam otaknya. Jadi, semua yang baik-baik itu yang seharusnya dilakukan", jelas Gubernur Kalteng tersebut.

Pendidikan anak usia dini menjadi tanggung jawab bersama orang tua, guru, pemerintah, lembaga PAUD dan masyarakat. Semua subyek berperan aktif pendidikan mensukseskan anak usia dini sesuai perannya masing-masing. "Pekerjaan dan pencapaian besar untuk memasyarakatkan PAUD masih menunaau. Melalui intervensi kebijakan pemerintah, dengan menggerakkan instrumen pemerintah dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. kita dapat melakukan investasi besar di bidang PAUD dan ini memiliki argumen yang sangat kuat", terang Gubernur Sugianto.

Bunda PAUD se-Kalimantan yang dikukuhkan Tengah masing-masing Ary Egahni Ben Bahan Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, Hj.Siti Zulaiha Windu Subagio Bunda PAUD Sukamara, Hj.Rusdianti Hendra Lesmana Bunda **PAUD** Lamandau. Hi.Khairiah Halikinnor Bunda **PAUD** Kotawaringin Barat, Fauziah Yulhaidir Bunda PAUD Seruyan, Lynda Kristiane Perdie Bunda PAUD Murung Raya, Hj.Sri Hidayati Nadalsyah Bunda PAUD Barito Utara, Munita Mustika Dewi Ampera Mebas Bunda PAUD Barito Timur, Hj.Permana Sari Selatan, Bunda PAUD Barito Hj.Nunu Andriani Edy Pratowo Bunda **PAUD** Pulana Pisau. Daurwaty Sakariyas Bunda PAUD Katingan dan Mina Irawati Ahmadi Riansyah sebagai Bunda PAUD Kabupaten Kotawaringin Barat.***

Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmennya Dukung Peningkatan Kualitas SDM Kalteng

PALANGKARAYA-BIRO PKP. Lima Perguruan Tinggi Swasta, 14 Sekolah Tinggi, 2 Akademi dan 2 Politeknik dengan 84 Program Studi yang bernaung di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan, masih belum ada yang terakreditasi A.

Tinggi Perguruan Swasta, Akademi dan Politeknik di Kalimantan Tengah yang belum terakreditasi A tersebut masih menghadapi beberapa masalah. utama terletak sumber daya manusianya antara lain jumlah Dosen yang bergelar Doktor dan dana penelitian untuk kalangan akademisi masih sedikit. Selain itu terjadi persaingan yang sangat ketat untuk memperoleh beasiswa yang disediakan pemerintah pusat.

Kondisi tersebut menjadi topik bahasan dalam pertemuan Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan Profesor Dr.Ir.H. Udinsyah, MS dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Kalteng dengan gubernur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur, Kamis (07/12).

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dalam pertemuan dengan Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan tersebut menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah sehingga ke depan tidak kalah dengan daerah lainnya. "Kemajuan generasi muda Kalimantan Tengah berada tangan para akademisi. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah akan terus mendukung dan membantu kemajuan dunia pendidikan di daerah ini, salah satunya melalui program Bidikmisi Kalteng Berkah", ungkap Sugianto Sabran.

Bidikmisi sebesar Rp 5 juta per tahun dinilai belum maksimal karena baru menyentuh 2.412 orang mahasiswa penerima. "Mudahmudahan ke depannya dapat ditingkatkan menjadi 5.000-10.000 orang yang kita bantu, bahkan pada tahun 2020 mendatang kita berharap gaji guru honorerpun sudah sesuai standar Upah Minimum Regional (UMR)", beber gubernur Kalteng.

kuat Komitmen gubernur disampaikan Kalteng tersebut dukungan mengingat dunia pendidikan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Tengah. Dukungan dunia pendidikan juga dapat diwujudkan dalam berbagai ide, gagasan dan inovasi seperti seminar, diskusi, workshop dan penelitian dari dunia akademisi pelaksanaan terkait dengan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah berada di tangan guru, dosen, dekan dan rektor. "Generasi muda Kalimantan Tengah jangan mau hanya menjadi penonton saja. Mahasiswamahasiswa harus cerdas, berprestasi, berkarakter, jujur dan yang terpenting adalah memiliki keberanian," tegas gubernur Kalteng Sugianto Sabran.***

Waket MPR RI Beberkan Peran Penting Perempuan Menjaga Keutuhan Bangsa.

Biro PKP, Palangka Raya -Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menegaskan kaum perempuan penting memegang peranan dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia Perempuan sebagai ibu bukan hanya merawat dan mengasuh anak, tapi juga sebagai guru yang mendidik anakanaknya. Selain itu, wanita sebagai merupakan pendukung, penyemangat, dan pengingat suami dalam menjalani roda kehidupan di saat suka maupun duka.

Mahyudin mengungkapkan hal itu di hadapan Ibu-Ibu Anggota dan Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Kalteng pada acara "Temu Tokoh Nasional"yang diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Kalimantan Tengah, di Gedung Dharma Wanita Palangka Raya, Rabu (12/12/2018) pagi.

Di hadapan Ibu-Ibu Anggota dan Pengurus BKMT Kalteng, Mahyudin menegaskan keberhasilan laki-laki tidak lepas dari peran perempuan dan keluarga. "Di balik sukses seorang laki-laki, selalu ada perempuan hebat, yang selalu mendukung dan menyertainya menuju keberhasilan", tegas Mahyudin.

Wakil Ketua **MPR** tersebut juga sangat mendukung kegiatan ibu-ibu yang terhimpun dalam BKMT dan mengharapkan setiap perempuan dapat selalu meningkatkan pemahaman agama, agar tidak disusupi pemahaman agama yang sempit sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan persatuan bangsa. "Kita sudah sering mendengar adanya itu terjadi terorisme. karena pemahaman agama yang sempit soal makna jihad. Akibatnya banyak orang mati sia-sia, dan itu merugikan kita semua", imbuh Mahyudin.

Sementara itu. Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutan Staf dibacakan Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Yuel Tanggara menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada BKMT Kalteng, yang telah menyelenggarakan acara Temu Tokoh Nasional dengan mengusung tema "Peranan Umat Islam dalam Menjaga Persatuan dan Nilai-Nilai Kebangsaan".

Gubernur Kalteng melalui Staf Ahli Gubernur Yuel Tanggara juga menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Wakil Ketua MPR RI Mahyudin tentang pentingnya kaum perempuan meningkatkan pemahaman agama, seraya mengungkapkan peran BKMT Kalteng dalam menjaga keutuhan bangsa, memandang keberagaman suku, agama, ras, dan golongan sebagai alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemicu perpecahan.

"Momentum Temu Tokoh Nasional ini diharapkan mampu menjadi media bagi kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan persaudaraan serta sesama anak bangsa. Bersama-sama kita meningkatkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, dan keharmonisan dalam bingkai keberagaman", beber gubernur.

Temu Tokoh Nasional itu dihadiri anggota Forkopimda Provindi Kalteng, Walikota Palangka Raya, dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng serta sejumlah tokoh masyarakat, agama, dan adat dengan nara sumber Anggota Komisi V DPR RI Hj. Agata Sulie dan Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam FTIK IAIN Palangka Raya Hj. Hamdanah.***

